



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Program Sekolah Swasta Gratis Tidak Menggantikan Kartu Jakarta Pintar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta akan mengkaji lebih lanjut penambahan sekolah swasta gratis pada tahun anggaran 2025. Program sekolah swasta gratis tersebut tak menggantikan bantuan sosial pendidikan Kartu Jakarta Pintar.

Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menyepakati tambahan sekolah swasta gratis pada Rabu (25/8/2024). Menurut rencana, secara bertahap akan bergulir kerja sama dengan 2.090 sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat pada tahun 2025. Anggaran untuk program itu ditaksir Rp 2,3 triliun setiap tahun berasal dari pengalihan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus).

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menuturkan, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2025, disepakati sekolah gratis akan dikaji lebih lanjut pada tahun anggaran 2025.

Namun, prinsipnya, program ini sudah disetujui dengan syarat adanya kajian yang komprehensif dan menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. "Ini, kan, kebutuhan karena terbatasnya bangku di sekolah negeri, khususnya untuk jenjang SMP dan SMA. Lalu, program KJP Plus akan tetap dilanjutkan. Nanti dikaji bersama sekolah swasta gratis," kata Justin, Senin (28/10).

Sebelumnya untuk penambahan sekolah swasta gratis, Dinas Pendidikan DKI Jakarta berencana mengalihkan anggaran KJP Plus untuk sekolah swasta gratis. Pada Agustus lalu, diberitakan di Kompas.id (26/8/2024), KJP Plus disebut akan dihapus karena program ini.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin kala itu menyebutkan, pihaknya secara bertahap akan menawarkan kerja sama kepada 2.090 sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat sehingga dapat berjalan pada tahun 2025. Pada saat yang sama tengah disiapkan program pengganti KJP Plus yang akan dihapus.

"Kami akan buat program untuk perlengkapan sekolah siswa. Perlengkapan untuk penerima KJP Plus yang diganti sekolah swasta gratis. Itu (program) setahun sekali," ujarnya sesuai meninjau uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri Cipayang 04 Pagi, Jakarta Timur, Senin (26/8).

Rencana perluasan sekolah swasta gratis diapresiasi masyarakat ataupun para pemerhati pendidikan. Akan tetapi, muncul kritik pula terkait rencana awal dihapuskannya KJP Plus. Hal ini dikarenakan program KJP Plus tak hanya mempermudah siswa dan orangtuanya memenuhi kebutuhan pendidikan di luar biaya sekolah. Program ini ikut memutar roda ekonomi banyak usaha masyarakat yang terafiliasi dengan KJP Plus. Untuk itu, kabar terbaru bahwa KJP Plus tidak akan dihapus membawa harapan baru di tengah kelesuan ekonomi ini.

Implementasi sistem sekolah swasta gratis bersama KJP Plus hampir sama dengan skema penerimaan peserta didik baru (PPDB) bersama. Skema *public private partnership* ini bertujuan memperluas daya tampung jenjang SMP, SMA, dan SMK dengan melibatkan 406 SMP dan SMA/SMK swasta gratis dengan daya tampung 8.426 siswa pada tahun 2024.

"Kami masih kaji angka (anggaran) pasti untuk tambahan sekolah swasta gratis," ujar

Justin.

KJP Plus adalah program strategis untuk memberikan akses kepada warga usia sekolah, 6-21 tahun, dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau program peningkatan keahlian relevan.

Penerima KJP Plus dapat memanfaatkan dana bantuan untuk keperluan uang saku, transportasi, alat tulis dan perlengkapan sekolah, buku dan penunjang pelajaran, alat atau bahan praktik, seragam sekolah dan kelengkapannya, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator ilmiah, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer/laptop, dan alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus.

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat jumlah penerima pada tahun 2024 naik dari 445.303 orang menjadi 533.649 orang dengan anggaran Rp 2,46 triliun.

Makan bergizi gratis

Di sisi lain, Komisi E DPRD DKI Jakarta membahas makan bergizi gratis yang, menurut rencana, berjalan tahun 2025. Alokasi anggarannya menunggu peraturan pelaksana dari pemerintah pusat.

Menurut Justin, tim anggaran pemerintah daerah telah mengalokasikan sebagian dana untuk program makan bergizi gratis dalam pos belanja tidak terduga (BTT) untuk tahun anggaran 2025.

"Peruntukan anggaran BTT masih dibahas saat ini. Kepastiannya nanti saat Badan Anggaran melakukan pembahasan akhir KUA-PPAS 2025," katanya.

Sejauh ini Pemprov DKI Jakarta telah menggelar 12 kali uji coba makan bergizi gratis dari

tingkat SD-SMA atau sederajat. Sebanyak 10.448 paket makanan dibagikan kepada siswa. Uji coba terakhir berlangsung di SDIT Al Ihsan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/10). Sebanyak 700 paket makanan dari dana bantuan sosial LRT Jakarta (Jakarta Pro-pertindo Group) dibagikan.

Secara terpisah, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, anggaran sekolah swasta gratis masih dibahas. Begitu juga KJP Plus yang tetap berjalan. Pihaknya menunggu pedoman pelaksanaan makan bergizi gratis secara nasional. Menurut rencana bakal berjalan awal 2025.

"Masih dibahas bersama legislatif. Kami terus uji coba untuk sosialisasikan program ini agar bisa berjalan dengan baik. Kami coba variasi menu, pelajari penyedia ataupun pelayanannya, termasuk nanti uji coba ke Pulau Seribu," ucap Teguh. (DAN)